



Bisa ke Swasta dengan Skema JPD Inklusi

Kuota SMP Negeri di Kota Jogja Terbatas, ABK Tetap Difasilitasi

JOGJA - Pemkot Jogja melalui dinas pendidikan pemuda dan olahraga (dindikpora) memastikan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang tidak tertampung di SMP negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Yakni melalui fasilitasi dan dukungan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Inklusi.

Sebagai informasi, seleksi penerimaan murid baru (SPMB) jalur afirmasi disabilitas tahun ajaran 2025/2026 sendiri membuka pendaftaran mulai 18 Juni 2025. Kuotanya 172 kursi untuk 16 SMP negeri di Kota Jogja.

Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan dan Resource Centre Dindikpora Kota Jogja Dian Yunila Handayani menyebutkan, kuota afirmasi disabilitas sebesar 5 persen dari total daya tampung sekolah. Ia mengungkapkan, skema SPMB jenjang SMP tahun ini secara sistem menggunakan *real time online* (RTO). Di mana yang berbeda adalah skala prioritasnya.

"Prioritasnya ABK berdasar surat dokter, sudah didampingi sejak kelas 4 atau 5 SD, punya asesmen dari ULD atau mitra seperti PPT UIL, dan hasil asesmen dari biro lain," katanya



CARI SEKOLAH: Para orang tua siswa memadati kantor Dindikpora Kota Jogja dalam rangka mengurus prosesi pendaftaran anaknya ke sekolah SD dan SMP.

kemarin (17/6).

Selain itu, salah satu kualifikasi yang dicantumkan dalam seleksi bagi para ABK adalah, mereka yang memiliki rentang *intelligence quotient* (IQ) berkisar antara 65 sampai 84. Dian merinci, dari data yang dihimpun, saat ini terdapat 233 ABK asal Kota Jogja yang menyelesaikan pendidikan SD, sementara kuota SMP negeri hanya terdapat 172 kursi.

"Sekitar 61 anak tidak tertampung di sekolah negeri. Mereka akan kami fasilitasi ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dan mendapat JPD Inklusi," jelasnya.

Fasilitasi itu diberikan tanpa melihat kondisi ekonomi keluarga siswa. Setidaknya tercatat 11 SMP swasta yang sudah menjadi mitra seperti SMP Bopkri 3, SMP IT Masjid Syuhada, dan

sejumlah SMP Muhammadiyah.

"JPD Inklusi yang diberikan senilai Rp 4 juta per tahun untuk tiap siswa. Rinciannya Rp 1,5 juta untuk biaya sekolah dan Rp 500 ribu untuk uang saku per semester," terangnya.

Lebih lanjut Dian menambahkan, sejauh ini total tersedia 17 guru pendamping khusus (GPK) yang ditugaskan di sekolah swasta dan 30 GPK di SMP negeri.

Salah satu orang tua siswa yang memiliki ABK, Eka Setyaningsih menyambut baik langkah Pemkot ini. Putrinya kini tengah mempersiapkan masuk ke SMP. "Ada kekhawatiran saya soal keterbatasan kuota di SMP negeri. Namun adanya JPD Inklusi ini membuat saya lega," tuturnya.

Secara garis besar Eka mengaku tidak mengharuskan sang anak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP negeri. (iza/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005